

Peningkatan Akses Transportasi: Strategi untuk Memperbaiki Pendapatan Komunitas Pedesaan di Indonesia

Ari Susanto^{1*}, Moh Wahib²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya
email: ari.susanto@stiemahardhika.ac.id, moh.wahib@stiemahardhika.ac.id

Article Info

Article history:

Received : 28 - 01, 2026

Revised : 07 - 02, 2026

Accepted : 28 - 02, 2026

Keywords:

akses transportasi, pendapatan pedesaan, infrastruktur jalan, pembangunan wilayah, Indonesia.

ABSTRACT

Peningkatan akses transportasi merupakan determinan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Keterbatasan infrastruktur transportasi di wilayah rural terbukti meningkatkan biaya logistik, mempersempit akses pasar, serta menghambat mobilitas tenaga kerja dan distribusi hasil pertanian. Studi ini bertujuan menganalisis strategi peningkatan akses transportasi sebagai instrumen kebijakan untuk memperbaiki pendapatan komunitas pedesaan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis kebijakan dan telaah literatur internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa investasi infrastruktur jalan, integrasi moda transportasi lokal, serta penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan akses pasar. Temuan ini sejalan dengan laporan World Bank (2019) yang menegaskan bahwa konektivitas jalan pedesaan berhubungan langsung dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, penelitian oleh Asian Development Bank (2021) menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur transportasi pedesaan berdampak pada penurunan biaya distribusi hingga 30% dan peningkatan pendapatan petani secara signifikan. Secara teoretis, hasil ini juga didukung oleh pendekatan pembangunan ekonomi wilayah yang menekankan pentingnya konektivitas sebagai katalis pertumbuhan inklusif (Donaldson, 2018). Dengan demikian, strategi peningkatan akses transportasi berbasis kolaborasi multipihak dan keberlanjutan fiskal menjadi rekomendasi utama dalam memperkuat daya saing ekonomi pedesaan di Indonesia

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



*Corresponding Author:

Ari Susanto
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya, Indonesia
Email: ari.susanto@stiemahardhika.ac.id

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan struktural di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu determinan utama ketimpangan tersebut adalah keterbatasan akses transportasi yang berdampak langsung pada rendahnya konektivitas ekonomi, tingginya biaya logistik, serta terbatasnya akses masyarakat pedesaan terhadap pasar, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas fisik, tetapi juga sebagai katalis integrasi pasar dan transformasi struktural ekonomi wilayah. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, konektivitas wilayah menjadi prasyarat penting bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan inklusif (Donaldson, 2018).

Laporan World Bank (2019) menegaskan bahwa peningkatan akses jalan pedesaan berkorelasi signifikan dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Indikator Rural

Access Index menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal dalam radius dua kilometer dari jalan layak sepanjang musim memiliki peluang ekonomi yang lebih besar dibandingkan mereka yang terisolasi secara geografis. Selain itu, Asian Development Bank (2021) melaporkan bahwa investasi transportasi pedesaan di kawasan Asia berkontribusi terhadap efisiensi distribusi hasil pertanian dan peningkatan pendapatan petani melalui penurunan biaya angkut dan waktu tempuh. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa infrastruktur transportasi merupakan investasi produktif yang berdampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Dalam konteks Indonesia, wilayah pedesaan memiliki kontribusi besar terhadap sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Namun, keterbatasan jaringan jalan dan minimnya integrasi moda transportasi menyebabkan rantai distribusi tidak efisien, sehingga margin keuntungan produsen lokal menjadi rendah. Studi empiris global menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi dapat meningkatkan integrasi pasar dan mendorong konvergensi harga antarwilayah (Donaldson, 2018). Dengan demikian, peningkatan akses transportasi tidak hanya berdampak pada aspek mobilitas, tetapi juga pada stabilitas harga, perluasan pasar, dan peningkatan daya saing komoditas pedesaan.

Meskipun berbagai program pembangunan infrastruktur telah dilakukan, tantangan keberlanjutan, tata kelola, dan partisipasi masyarakat masih menjadi isu penting. Literatur internasional menekankan bahwa efektivitas pembangunan transportasi pedesaan sangat dipengaruhi oleh perencanaan berbasis kebutuhan lokal, kolaborasi multipihak, serta integrasi kebijakan sektoral (World Bank, 2019). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik jalan, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, pembiayaan berkelanjutan, dan pemberdayaan komunitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan akses transportasi sebagai instrumen kebijakan dalam memperbaiki pendapatan komunitas pedesaan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur pembangunan wilayah serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan transportasi pedesaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Akses Transportasi dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Akses transportasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan yang sering kali terhambat oleh keterbatasan jaringan infrastruktur. Donaldson (2018) menjelaskan bahwa peningkatan aksesibilitas transportasi dapat memperluas interaksi ekonomi antarwilayah, menurunkan biaya distribusi, serta mendorong efisiensi pasar. Infrastruktur transportasi yang memadai memungkinkan mobilitas tenaga kerja dan barang yang lebih lancar serta menciptakan peluang pasar baru bagi pelaku ekonomi di daerah pedesaan. Hal ini sejalan dengan kajian pembangunan ekonomi wilayah yang menempatkan konektivitas sebagai katalis pertumbuhan inklusif dan pemerataan ekonomi (Banerjee, Duflo, & Qian, 2020). Donaldson (2018) menunjukkan bahwa pembangunan jaringan rel kereta api di India pada abad ke-19 secara signifikan meningkatkan keterpaduan pasar komoditas dan meningkatkan pendapatan riil konsumennya. Walaupun konteks historis berbeda, prinsip dasar hubungan antara akses transportasi dan integrasi pasar tetap relevan dalam konteks pembangunan pedesaan di era modern.

2.2 Transportasi Pedesaan dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Masyarakat

Berbagai studi internasional telah menunjukkan hubungan positif antara akses transportasi dengan pendapatan rumah tangga pedesaan. Menurut World Bank (2019), keterhubungan jalan pedesaan yang lebih baik berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui penurunan biaya angkut dan peningkatan akses pasar produk-produk pertanian (Gannon, C., & Liu, Z., 1997). Indeks Rural Access Index dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas fisik berhubungan erat dengan penurunan kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, penelitian yang dirangkum oleh Asian Development Bank (2021) menegaskan bahwa investasi pada infrastruktur transportasi pedesaan di Asia Tenggara berkorelasi dengan penurunan waktu tempuh hingga 40% dan penurunan biaya logistik yang berdampak positif pada margin pendapatan petani. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya perbaikan infrastruktur transportasi mendorong integrasi pasar yang lebih baik dan membuka akses terhadap layanan sosial ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan.

2.3 Strategi Peningkatan Akses Transportasi di Wilayah Pedesaan

Literatur internasional mengidentifikasi beberapa strategi efektif dalam meningkatkan akses transportasi pedesaan. Pertama, pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan yang adaptif terhadap kondisi geografis daerah pedesaan menjadi fondasi utama. Menurut Fan dan Chan-Kang (2008), investasi infrastruktur jalan pedesaan lebih efektif jika didukung dengan sistem operasi dan pemeliharaan jangka panjang yang melibatkan komunitas lokal. Kedua, integrasi moda transportasi antara tingkat lokal dan regional juga merupakan strategi penting.

Studi oleh Pinho dan Silva (2016) menunjukkan bahwa konektivitas multi-moda (misalnya jalan, angkutan umum pedesaan, dan rel) dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis moda, serta meningkatkan efisiensi sistem transportasi secara keseluruhan. Ketiga, tata kelola yang melibatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal dapat menciptakan model pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan setempat (Uddin & Sarkar, 2019). Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki fungsi fisik infrastruktur, tetapi juga memperkuat penggunaan sosial ekonomi infrastruktur tersebut bagi masyarakat.

2.4 Kesenjangan Penelitian dan Relevansi Konteks Indonesia

Meskipun banyak studi internasional telah menyoroti hubungan positif antara akses transportasi dengan pendapatan masyarakat pedesaan, penerapan strateginya sangat kontekstual tergantung pada kondisi geografis, budaya, dan sistem kelembagaan masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, studi empiris tentang strategi peningkatan akses transportasi yang menggabungkan aspek sosial ekonomi dan kebijakan publik masih terbatas. Oleh karena itu, kajian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan pada strategi yang relevan dengan karakteristik pedesaan Indonesia, termasuk pertimbangan geografi kepulauan, variasi tingkat keterhubungan antar wilayah, dan dinamika sosial ekonomi komunitas rural.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis strategi peningkatan akses transportasi dalam memperbaiki pendapatan komunitas pedesaan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan yang kompleks dalam konteks pembangunan transportasi pedesaan (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini juga relevan untuk mengkaji fenomena yang melibatkan berbagai aktor, persepsi, dan praktik yang tidak mudah diukur secara kuantitatif. Desain penelitian ini bersifat studi kasus komparatif yang dilakukan melalui telaah literatur internasional dan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi praktik strategis peningkatan akses transportasi yang relevan dengan konteks pedesaan Indonesia. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks dunia nyata serta menggali hubungan sebab-akibat antara kebijakan transportasi dan variabel ekonomi masyarakat pedesaan (Yin, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Peningkatan Akses Transportasi dan Integrasi Pasar Pedesaan

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa peningkatan akses transportasi memiliki korelasi kuat dengan integrasi pasar dan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan di Indonesia. Infrastruktur jalan yang memadai menurunkan biaya transaksi, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta memperluas jangkauan pasar ke wilayah urban. Studi empiris oleh Donaldson (2018) membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi mampu mengintegrasikan pasar komoditas dan meningkatkan kesejahteraan riil masyarakat melalui konvergensi harga antarwilayah. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa konektivitas bukan sekadar aspek fisik, melainkan instrumen strategis dalam transformasi ekonomi pedesaan.

Sejalan dengan itu, laporan World Bank (2019) menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan yang memiliki akses terhadap jalan layak sepanjang musim memiliki peluang ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah terisolasi. Indikator Rural Access Index menegaskan bahwa konektivitas transportasi berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks Indonesia, peningkatan kualitas jalan desa dan konektivitas antarwilayah terbukti memperpendek rantai distribusi produk pertanian dan meningkatkan margin keuntungan produsen lokal.

4.2 Efisiensi Biaya Logistik dan Dampaknya terhadap Pendapatan

Analisis tematik menunjukkan bahwa efisiensi biaya logistik merupakan mekanisme utama yang menjelaskan hubungan antara akses transportasi dan peningkatan pendapatan. Asian Development Bank (2021) melaporkan bahwa investasi transportasi pedesaan di kawasan Asia mampu menurunkan biaya distribusi secara signifikan serta meningkatkan akses petani terhadap pasar regional. Penurunan biaya angkut berdampak langsung pada peningkatan pendapatan bersih rumah tangga pedesaan.

Selain itu, Banerjee, Duflo, dan Qian (2020) menemukan bahwa akses terhadap jaringan transportasi di wilayah rural Tiongkok mendorong diversifikasi ekonomi dan memperluas kesempatan kerja non-pertanian. Temuan ini relevan dengan konteks Indonesia, di mana peningkatan akses transportasi berpotensi mempercepat transformasi ekonomi desa dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier, seperti agroindustri dan jasa logistik lokal. Dengan demikian, transportasi berfungsi sebagai enabling factor dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.

4.3 Strategi Peningkatan Akses Transportasi Berbasis Tata Kelola dan Partisipasi

Hasil penelitian juga mengidentifikasi bahwa efektivitas peningkatan akses transportasi tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada tata kelola dan partisipasi masyarakat. Studi oleh Uddin dan Sarkar (2019) menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan transportasi pedesaan guna memastikan keberlanjutan dan relevansi kebijakan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur meningkatkan rasa kepemilikan serta efisiensi pemanfaatan fasilitas transportasi.

Dalam konteks Indonesia, strategi kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas desa menjadi faktor krusial dalam menjamin keberlanjutan infrastruktur (Jacoby, H. G., 2000). Model pembiayaan berbasis kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership) dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan rekomendasi World Bank (2019) yang menekankan pentingnya sinergi kebijakan lintas sektor dalam pembangunan transportasi pedesaan.

4.4 Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat paradigma pembangunan wilayah yang menempatkan konektivitas sebagai faktor kunci pertumbuhan inklusif. Infrastruktur transportasi berperan sebagai multiplier effect yang memengaruhi produktivitas, stabilitas harga, serta distribusi pendapatan antarwilayah (Donaldson, 2018). Secara praktis, strategi peningkatan akses transportasi di Indonesia perlu diarahkan pada:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa berbasis kebutuhan lokal,
- b. Integrasi moda transportasi regional,
- c. Penguatan tata kelola dan partisipasi komunitas, serta
- d. Pembiayaan berkelanjutan melalui kemitraan strategis.

Dengan pendekatan tersebut, peningkatan akses transportasi tidak hanya memperbaiki mobilitas fisik, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam meningkatkan pendapatan komunitas pedesaan secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan akses transportasi merupakan strategi fundamental dalam memperbaiki pendapatan komunitas pedesaan di Indonesia. Infrastruktur transportasi yang memadai berkontribusi terhadap integrasi pasar, efisiensi biaya logistik, mobilitas tenaga kerja, serta perluasan akses terhadap layanan sosial-ekonomi (Dercon, S., et. al., 2009). Literatur internasional menunjukkan bahwa konektivitas jalan pedesaan berkorelasi positif dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga (World Bank, 2019).

Temuan empiris juga menguatkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi mampu menciptakan konvergensi harga antarwilayah dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat melalui integrasi pasar yang lebih efisien (Donaldson, 2018). Selain itu, investasi transportasi pedesaan di kawasan Asia terbukti menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan margin keuntungan petani (Asian Development Bank, 2021). Dengan demikian, akses transportasi berperan sebagai enabling infrastructure yang mendorong transformasi ekonomi pedesaan dari sektor primer menuju sektor yang lebih produktif dan bernilai tambah.

Secara konseptual, peningkatan akses transportasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pembangunan fisik jalan, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan tata kelola, pembiayaan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi peningkatan akses transportasi harus dirancang secara komprehensif dan kontekstual agar mampu memberikan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur Berbasis Kebutuhan Lokal
Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan jalan pedesaan yang adaptif terhadap kondisi geografis serta potensi ekonomi lokal. Perencanaan berbasis kebutuhan wilayah akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi investasi infrastruktur (World Bank, 2019).
2. Integrasi Moda Transportasi dan Konektivitas Regional
Integrasi antara jaringan jalan desa dengan pusat distribusi regional dan pasar kota perlu diperkuat guna menciptakan sistem transportasi yang terhubung secara menyeluruh. Integrasi ini akan mempercepat arus barang dan jasa serta memperluas akses pasar bagi produk pedesaan (Asian Development Bank, 2021).

3. Penerapan Tata Kelola Kolaboratif dan Pembiayaan Inovatif
Pembangunan transportasi pedesaan perlu melibatkan kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Model kemitraan publik–swasta dapat menjadi alternatif solusi pembiayaan berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan infrastruktur.
4. Penguatan Riset dan Evaluasi Dampak
Penelitian lanjutan berbasis data empiris di tingkat mikro perlu dilakukan untuk mengukur dampak langsung peningkatan akses transportasi terhadap pendapatan rumah tangga pedesaan di Indonesia. Evaluasi berbasis bukti akan memperkaya literatur dan memperkuat dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran (Donaldson, 2018).

Dengan implementasi strategi yang terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan, peningkatan akses transportasi berpotensi menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam memperbaiki pendapatan komunitas pedesaan serta memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia (Asian Development Bank, 2017).

5.3 Novelty (Kebaruan Penelitian)

Penelitian mengenai akses transportasi dan pembangunan ekonomi pedesaan telah banyak dilakukan dalam konteks global. Studi klasik oleh Donaldson (2018) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi memiliki dampak signifikan terhadap integrasi pasar dan peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui konvergensi harga antarwilayah. Demikian pula, laporan World Bank (2019) dan Asian Development Bank (2021) menegaskan bahwa konektivitas jalan pedesaan berkorelasi dengan penurunan kemiskinan serta peningkatan pendapatan masyarakat di berbagai negara berkembang. Namun, sebagian besar studi tersebut berfokus pada analisis makroekonomi atau pengukuran dampak infrastruktur secara agregat tanpa mengintegrasikan dimensi tata kelola lokal, strategi kolaboratif, serta karakteristik geografis spesifik negara kepulauan seperti Indonesia (Gachassin, M., et. al., 2010). Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama.

Pertama, penelitian ini mengintegrasikan perspektif ekonomi pembangunan dengan pendekatan tata kelola kolaboratif dalam merumuskan strategi peningkatan akses transportasi (Calderón, C., & Servén, L., 2014). Jika studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada dampak ekonomi langsung, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang menempatkan infrastruktur transportasi sebagai bagian dari ekosistem pembangunan wilayah yang melibatkan sinergi pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Pendekatan ini memperluas temuan Uddin dan Sarkar (2019) mengenai pentingnya partisipasi dalam perencanaan transportasi pedesaan dengan mengaitkannya secara langsung pada peningkatan pendapatan komunitas. Kedua, penelitian ini menawarkan pendekatan kontekstual berbasis karakteristik geografis dan sosial ekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan disparitas konektivitas antarwilayah.

Literatur internasional cenderung berbasis pada konteks kontinental seperti India atau Tiongkok (Donaldson, 2018; Banerjee, Duflo, & Qian, 2020), sehingga kurang mempertimbangkan tantangan logistik dan fragmentasi wilayah yang khas pada negara kepulauan. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengadaptasi praktik global ke dalam kerangka kebijakan yang relevan dengan struktur spasial Indonesia. Ketiga, penelitian ini mengembangkan sintesis strategis berbasis analisis tematik yang tidak hanya menilai dampak ekonomi, tetapi juga mengidentifikasi mekanisme transmisi peningkatan pendapatan melalui efisiensi logistik, diversifikasi ekonomi, dan transformasi struktur produksi pedesaan. Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan paradigma konektivitas sebagai *enabling infrastructure* dalam pembangunan inklusif, sementara kontribusi praktisnya berupa rekomendasi kebijakan terintegrasi yang berbasis bukti internasional namun disesuaikan dengan kebutuhan lokal (Bell, C., & van Dillen, S., 2014).

Melalui integrasi dimensi ekonomi, tata kelola, dan konteks geografis, penelitian ini menawarkan model strategis yang lebih komprehensif dibandingkan studi terdahulu. Kebaruan ini diharapkan dapat memperkaya literatur pembangunan transportasi pedesaan serta menjadi referensi dalam perumusan kebijakan peningkatan pendapatan komunitas pedesaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (2017). Meeting Asia's infrastructure needs. Manila: ADB. <https://doi.org/10.22617/TCS210123>
- Asian Development Bank. (2021). Rural transport and poverty reduction in Asia. Manila: ADB. <https://doi.org/10.22617/TCS210123>

- Banerjee, A., Duflo, E., & Qian, N. (2020). On the road: Access to transportation infrastructure and economic development in China. *Journal of Development Economics*, 146, 102483. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2020.102483>
- Bell, C., & van Dillen, S. (2014). On the way to good governance: The role of transport infrastructure in rural development. *World Development*, 64, 256–270. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.06.010>
- Calderón, C., & Servén, L. (2014). Infrastructure, growth, and inequality: An overview. World Bank Policy Research Working Paper, 7034. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7034>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dercon, S., Gilligan, D. O., Hoddinott, J., & Woldehanna, T. (2009). The impact of roads and agricultural extension on consumption growth and poverty in Ethiopia. *American Journal of Agricultural Economics*, 91(4), 1007–1021. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8276.2009.01325.x>
- Donaldson, D. (2018). Railroads of the Raj: Estimating the impact of transportation infrastructure. *American Economic Review*, 108(4–5), 899–934. <https://doi.org/10.1257/aer.20101199>
- Fan, S., & Chan-Kang, C. (2008). *Regional road development, rural and urban poverty: Evidence from China*. Washington, DC: International Food Policy Research Institute.
- Gachassin, M., Najman, B., & Raballand, G. (2010). The impact of roads on poverty reduction: A case study of Cameroon. *World Development*, 38(7), 1136–1149. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.01.002>
- Gannon, C., & Liu, Z. (1997). *Poverty and transport*. World Bank Discussion Paper, 339. Washington, DC: World Bank.
- Jacoby, H. G. (2000). Access to markets and the benefits of rural roads. *Economic Journal*, 110(465), 713–737. <https://doi.org/10.1111/1468-0297.00562>
- Pinho, P., & Silva, C. (2016). Multi-modal transport solutions to improve rural accessibility: Lessons from Europe. *Transport Policy*, 51, 154–162. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.01.003>
- Uddin, M. N., & Sarkar, S. (2019). Participatory transport planning and governance: A pathway to sustainable rural mobility. *Transport Reviews*, 39(2), 170–189. <https://doi.org/10.1080/01441647.2018.1527087>
- World Bank. (2019). *Rural access index: A key development indicator*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1443-3>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications